

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Subang Berdasarkan Potensi Wilayah: Praktik Literasi Dan Pemetaan Sumber Daya

**Estu Widarwati¹, Gugyh Susandy², Devy Widya Apriandi³, Tigin Lugiani⁴,
Nunik Nurmalasari⁵**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Subang, Jawa Barat

dwiiiriyani@ecampus.ut.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci: Pengembangan masyarakat; ekonomi pesisir; pemanfaatan sumber daya, perusahaan jasa kelautan, wisata bahari

Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Subang khususnya bagian utara memiliki kelebihan dalam hal maritim dengan potensi laut menguntungkan yang dapat dikembangkan untuk kebermanfaatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dioptimalkan melalui pemahaman dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Potensi wilayah pesisir yang diketahui secara baik oleh semua pihak berkepentingan baik dari sisi peluang, tantangan, dan strategi pemanfaatannya, diharapkan dapat mempercepat program pengembangan ekonomi masyarakat pesisir secara efektif dan efisien. Paper ini merangkum kegiatan Abdimas proses pengembangan ekonomi ekonomi pesisir Kabupaten Subang dalam bentuk praktik sosialisasi dan pemetaan sumber daya pada masyarakat lokal pesisir dan stakeholder Kabupaten Subang. Hasil kegiatan Abdimas memberikan dampak adanya persamaan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya pesisir dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan perusahaan jasa kelautan di Kabupaten Subang, serta diperoleh informasi peluang dan kendala pengembangan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan pemilihan model pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

A. Pendahuluan

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil menurut batas yurisdiksi suatu negara (UU No.1 Tahun 2014). Jumlah penduduk Indonesia 60% berada di wilayah pesisir dan kontribusi ekonomi pesisir mencapai 30%. Oleh karenanya, wilayah pesisir menjadi salah satu ekosistem yang produktif dan kompleks, baik dinamika sistem ekologi maupun sistem sosial ekonomi masyarakatnya. Pengembangan masyarakat pesisir ini menjadi penting dalam konteks pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Penduduk di wilayah pesisir pantai memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah, dimana pada musim barat sebagian nelayan tidak melaut dan sebagian besar dari mereka hanya menggantungkan hidupnya pada ikan laut. Dengan melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengembangan

mata pencaharian sebagai alternatif dalam mengembangkan perekonomian di wilayah pesisir.

Kestrategisan wilayah pesisir didukung dengan fakta bahwa pesisir merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang. Selain itu, wilayah pesisir memiliki ragam sumber daya masa depan (*future resources*) dan pusat biodiversitas laut yang dapat dikembangkan bernilai ekonomis, sehingga masyarakat pesisir berpeluang menjadi pusat produsen dan pesisir menjadi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik (Yonvitner dkk,2014). Eksplorasi potensi pesisir ini didukung PP No.93/PERMEN-KP/2020 bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dimanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi/peningkatan nilai tambah ekonomi.

Wilayah pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Subang. Masyarakat merupakan bagian dari potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber daya manusia yang produktif dapat berperan aktif dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan masyarakat sebagai berbagai upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela.

Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektifitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Pengembangan masyarakat pesisir bermanfaat besar antara lain peningkatan kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif masyarakat, peningkatan posisi tawar kolektif dalam akses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan, pengembangan kemampuan koordinasi dan kerjasama kemitraan, dan kemudahan pengendalian kegiatan ekonomi (Kusnadi, 2009).

Basis ekonomi pesisir untuk kesejahteraan masyarakat bertumpu pada kekayaan sumberdaya, kestrategisan kawasan dan akses, dan pemanfaatan laut. Kabupaten Subang sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi pesisir untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah pesisir. Luas wilayah pesisir Kabupaten Subang 16% dari keseluruhan wilayahnya dan terdapat beberapa pusat ekonomi masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Subang antara lain penangkapan dan penjualan perikanan, tambak dan budidaya laut (udang, ikan, garam), industri pariwisata bahari, industri maritim berupa galangan kapal/perbaikan mesin kapal, dan pengusahaan kelestarian alam pesisir seperti penangkaran buaya.

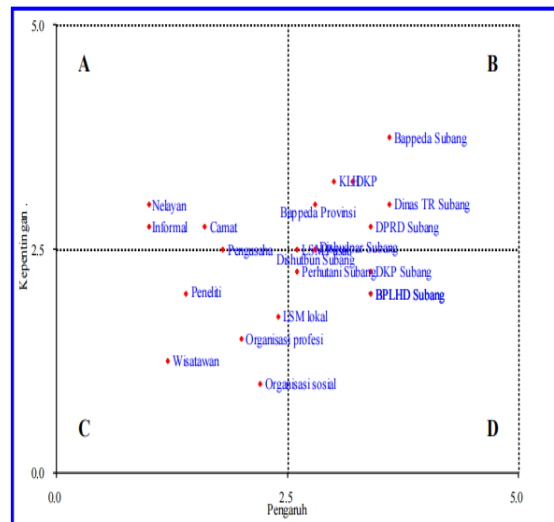
Tabel 1.
Sebaran Beberapa Potensi Wilayah Pesisir Kabupaten Subang

Kecamatan	Potensi Pengembangan Ekonomi	Alternatif Program Pengembangan
Blanakan	penangkapan & penjualan ikan, pembudidayaan ikan dan udang (tambak), penangkaran buaya	pengembangan kegiatan kelautan & perikanan (wisata bahari), nilai tambah produksi ikan & udang, pengembangan unit produksi skala ekonomi (akomodasi)
Legonkulon	pantai Mayangan, hutan mangrove	pengembangan unit produksi skala ekonomi (wisata alam mangrove, akomodasi), nilai tambah jasa wisata bahari
Sukasari	pantai Pondok Bali, pantai Cirewang, pantai Pondok Putri, pantai Gegara Menyan	nilai tambah jasa wisata bahari, pengembangan unit produksi skala ekonomi (wisata pantai, pemancingan, akomodasi)
Ciasem	pantai Ciasem	nilai tambah jasa wisata bahari, pengembangan unit produksi skala ekonomi (wisata pantai, pemancingan, akomodasi)
Pusakanagara	pantai patimban	nilai tambah jasa wisata bahari, pengembangan unit produksi skala ekonomi (wisata pantai, pemancingan, akomodasi)

Sumber: Data diolah (2023)

Program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Subang yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yaitu kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, kelayakan dalam pengembangan unit produksi berskala ekonomi, peningkatan nilai tambah produksi, serta pembangunan perdesaan dan perekonomian daerah (www.pi-dev.co.id/subang, 2023) Berdasarkan Perda No 3 Th 2022 Kabupaten Subang, diketahui Subang memiliki zona Pantai daerah rendah rata-rata ketinggian antara 0-50 meter dpl dengan luas wilayah 92.639,7 ha (45,15%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang dan mencakup wilayah Pantura (pantai utara) yaitu Pagaden, Pagaden Barat, Binong, Tambakdahan, Cipunagara, Compreg, Ciasem, Sukasari, Pusakanagara, Pusakajaya, Pamanukan, Legonkulon, Blanakan, Patokbeusi dan sebagian kecil Cikaum dan Purwadadi. Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha merupakan *stakeholder* yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Subang dan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi pesisir.

Gambar 1.
Matriks resultante hasil analisis stakeholder pembangunan wilayah
pesisir Kabupaten Subang (Sanim dkk, 2021)



Pada matrik gambar 1 tersebut, *Kuadran A* memperlihatkan bawah masyarakat pesisir seperti nelayan, usaha informal, kecamatan, dan pengusaha adalah *stakeholder* penting yang membutuhkan pemberdayaan dalam perencanaan pengembangan ekonomi wilayah pesisir. Sedangkan *Kuadran B* adalah kelompok *stakeholder* yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan pengembangan ekonomi wilayah pesisir yaitu Bappeda Probinsi dan Subang, DPRD Subang, dan Dinas TR Subang. Koordinasi antar stakeholder merupakan salah satu keberhasilan pengembangan ekonomi pesisir. Selain itu, Dukungan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir diperlukan agar mempercepat proses pengembangan tersebut yaitu ketersediaan sarana dan prasarana misal Tempat penjualan ikan, bersandar perahu, pom bensin, pabrik pengolahan es, pelabuhan, fasilitas kesehatan dll. termasuk akses permodalan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan juga optimalnya layanan pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, pendampingan terkait kebutuhan peningkatan keterampilan dan kemampuan lainnya.

Kegiatan Abdimas ini dilaksanakan selaras dengan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu pembangunan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan. Dukungan program pengembangan potensi menjadi fokus Kabupaten Subang yaitu eksplorasi potensi wilayah pesisir Kabupaten Subang bidang perikanan dan kelautan. Praktik sosialisasi dan pemetaan sumber daya merupakan penyamaan pemahaman konsep pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk penggalian informasi potensi sumber daya dan kendalanya. Praktik sosialisasi dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Pasal 2 PP No.93/PERMEN-KP/2020.

Bagaimanapun, pemanfaatan sumber daya pesisir adalah bentuk upaya pengelolaan pesisir dengan seluruh komponennya menggunakan prinsip keterpaduan integrasi aspek fisik, ekologi, biologi, sosial, ekonomi, politik, budaya serta pertahanan dan keamanan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan pesisir agar tetap berkelanjutan. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya pesisir perlu mempertimbangkan beberapa aspek antara lain sosial, budaya, dan ekonomi; konflik kepentingan, aspirasi masyarakat, serta kewenangan kebijakan. Kolaboratif masyarakat lokal pesisir dan *stakeholder* Kabupaten Subang yaitu Pemerintah (pusat dan daerah), Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengusaha, Lembaga Penelitian, & Kalangan Perguruan Tinggi akan mengarah pada pengelolaan kolaboratif (PK) atau *Co-Management* yang telah berhasil diterapkan di Kepulauan Maluku, Sulawesi, Bali, Lombok, Papua, Aceh (Yonvitner dkk, 2014).

Kunci sukses pengelolaan kolaboratif (PK) atas sumber daya pesisir bergantung pada beberapa faktor antara lain kejelasan batas-batas wilayah, kejelasan anggota dan keterikatannya dalam kelompok, prinsip fokus pada manfaat daripada biaya, pengelolaan sederhana, legalisasi pengelolaan, kerjasama & kepemimpinan, desentralisasi & wewenang, serta koordinasi pemerintah & masyarakat. Kolaboratif *stakeholder* dan masyarakat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan protokol tahapan Pengelolaan Kolaboratif (PK) Sumber Daya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat (PKSPL-BM) yaitu identifikasi kondisi wilayah pesisir, pemahaman kondisi wilayah segi ekologi, sosial, ekonomi, sosialisasi program peningkatan kesadaran masyarakat, rencana pengelolaan, pemahaman kondisi suatu wilayah, implementasi rencana pengelolaan, hingga evaluasi monitoring pelaksanaan, dan analisis kelemahan dan kelebihan dari sistem pengelolaan untuk perbaikan.

B. Metode Pelaksanaan

Topik Kegiatan Abdimas ini bersifat sosial dan dinamis dan oleh karenanya, metode Kegiatan Abdimas ini dilakukan dengan melalui pendekatan kualitatif yang dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial misal dengan pemahaman materi literasi/sosialisasi dan *forum discussion group (FGD)*. Pendekatan kualitatif disebut juga pendekatan investigasi karena mengumpulkan data dengan tatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di lokasi abdimas (Mc. Miller dan Schumaker,2003).

Format design pendekatan kualitatif ada tiga jenis yaitu format deskriptif, format verifikatif, dan format grounded research. Kegiatan Abdimas ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok

tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koejaraningrat, 1993). Pendekatan tersebut adalah cara terbaik untuk memahami kendala, potensi, dan pandangan masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Subang tentang rencana pengembangan ekonomi pesisir melalui pengelolaan pengairan jasa kelautan, peningkatan bidang perikanan, dan improvisasi wisata bahari.

Pendekatan kualitatif Kegiatan Abdimas ini adalah penyelenggaraan praktik sosialisasi berkenaan rencana pengembangan ekonomi pesisir didasarkan potensi sumber daya yang tersedia, serta *forum discussion group (FGD)* yang memetakan tantangan, kendala, potensi, dan permasalahan optimalisasi ekonomi wilayah pesisir antara lain penangkapan ikan, eksplorasi produksi garam, wisata bahari, serta akses permodalan dan fasilitas dana bantuan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Abdimas ini dilaksanakan Selasa 7 November di Aula KUD Mandiri Fajar Sidik Blanakan, Desa Blanakan, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Pelaksanaan Kegiatan Abdimas tersebut dihadiri sekitar 50 orang terdiri dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Pemerintah Daerah Subang yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah raga, Perguruan Tinggi wakil akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Satker PSDKP, Koordinator Penyuluh Perikanan dan masyarakat pesisir seperti HSNi Kabupaten Subang, KUD pesisir, para Pokwasmas wilayah pesisir, para pembudidaya tambak, pengelola wisata pantai pesisir Kabupaten Subang, Komunitas pemancing, dan kelompok wanita pengelola hasil laut.

Kegiatan Abdimas mencakup tiga sesi yaitu praktik sosialisasi, praktik pemetaan sumber daya, serta diskusi penyusunan kesimpulan.

1. Sesi praktik sosialisasi

Sosialisasi adalah proses individu dan atau kelompok memperoleh kepercayaan, norma, dan nilai atas sesuatu. Praktik sosialisasi pengembangan ekonomi pesisir merupakan bagian dari literasi ekonomi mengenai kebijakan, peluang, dan tahapan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui penyampaian materi yang terpadu dari para stakeholder, diharapkan semua pihak saling mengetahui dan memahami peran pentingnya masing-masing dalam pengembangan ekonomi pesisir untuk persiapan yang menyeluruh untuk proses pengembangan ekonomi masyarakat pesisir baik material maupun non-material.

Gambar 2.

Pembukaan Acara Abdimas oleh Ketua KUD Mandiri Fajar Sidik Blanakan



Praktik sosialisasi dilaksanakan dengan menghadirkan 3 narasumber yaitu:

- a) Pemerintah Pusat yang diwakili Direktorat Jasa Kelautan yaitu Ibu Ririn Ambarwati S.Pi, M.Si dengan materi Kebijakan Pengusahaan Jasa Kelautan. Penyampaian kebijakan tersebut dimaksudkan untuk pemahaman masyarakat pesisir tentang dukungan pemanfaatan sumber daya pesisir untuk pengusahaan jasa kelautan.
- b) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang diwakili:
 - i. Dinas Perikanan Kabupaten Subang oleh Bapak Budi Rakhman, S.Pi, M.Si yang menyampaikan materi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang tentang kebijakan dan peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Informasi tersebut ditujukan bagi pemerintah pusat dan masyarakat pesisir perihal kesempatan pengembangan ekonomi dari usaha kelautan dan perikanan.
 - ii. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah raga oleh Bapak Tatang Supriatna, S.IP., M.I.Pol yang menyampaikan tentang Ekonomi Kreatif dan Wisata Bahari untuk Pengembangan Usaha Pemanfaatan Jasa Kelautan. Hal tersebut ditujukan bagi masyarakat pesisir dan pemerintah pusat mengenai potensi wisata bahari pesisir Kabupaten Subang yang bisa dieksplor dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Subang.
- c) Akademisi Perguruan Tinggi yang diwakili Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja yaitu Ibu Dr. Estu Widarwati, SE., M.Si dengan topik Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Subang Berdasarkan Potensi Wilayah. Materi tersebut disampaikan untuk informasi pentingnya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, dan apa saja yang perlu dipersiapkan termasuk tahapan pengembangan ekonomi pesisir.

Praktik sosialisasi berlangsung dari jam 10.00 - 12.00 wib dengan durasi tiap pemateri sekitar 45 menit dan bersifat *panel discussion*.

Gambar 3.

Penyampaian materi tentang kebijakan pengusahaan jasa kelautan oleh Ibu Ririn Ambarwati, S.Pi, M.Si dari Direktorat Jasa Kelautan



Pada kesempatan pertama, pihak Direktorat Jasa Kelautan menginformasikan adanya program prioritas direktorat jasa kelautan yaitu pengembangan usaha garam rakyat, pengembangan wisata bahari, dan pemanfaatan biofarmakologi. Hal ini diterima antusias oleh para peserta dan berlanjut pada sesi diskusi setelah penyampaian materi mengenai mekanisme bantuan untuk usaha garam rakyat dan wisata pantai. Dampak sosialisasi dari pemerintah pusat dalam hal ini direktorat jasa kelautan adalah tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya tidak mengetahui adanya program bantuan untuk usaha kelautan menjadi tahu dan ada minat untuk pengajuannya.

Gambar 4.

Penyampaian materi tentang kebijakan dan peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan oleh Budi Rakhman, S.Pi, M.Si dari Dinas Perikanan Kabupaten Subang



Untuk kesempatan kedua adalah sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Subang yang diwakili Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Kepemudahaan, Olahraga (Dispora). Bapak Budi Rakhman, S.Pi, M.Si dari Dinas Perikanan Kabupaten Subang mengemukakan adanya

kebijakan pembangunan usaha kelautan dan perikanan Kabupaten Subang antara lain peeningkatan kontribusi sektor kelautan dan Perikanan dalam perekonomian lokal/daerah maupun nasional, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil, pengolah ikan, juga petambak garam, serta perwujudan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang optimal, lestari dan berkelanjutan. Produksi kelautan dan perikanan Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang didominasi oleh ikan Tembang, Ikan Blanak, Ikan Kembung, Ikan Layang, Tongkol, Ikan Selar, Ikan Peperek, Udang dan Cumi-Cumi. Lebih lanjut, beliau menyampaikan adanya peluang peningkatan sumber daya perikanan budidaya dengan pemanfaatan lahan untuk tambak komoditas unggulan udang, bandeng, nila. Selain itu, peluang pengembangan produksi olahan hasil perikanan antara lain penggaraman/pengeringan asin, pemindangan, dan fermentasi dengan jenis bahan baku tongkol, deles, salem, layang, bandeng, cakalang, teri, deho, mas, bawal. Informasi yang disampaikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang ini menambah pengetahuan masyarakat dan mendorong keinginan pemanfaatan lahan untuk pengusaha produksi perikanan. Hal ini terlihat pada semangat peserta berdiskusi mengenai ketersediaan lahan yang bisa digunakan untuk usaha tambak dan prosedur pengajuan izinnya.

Adapun sosialisasi dari Dispora yaitu Bapak Tatang Supriatna, S.IP., M.I.Pol berisi informasi perihal ragam bentuk ekonomi kreatif yang telah dilakukan berupa film berlatar pantai Kabupaten Subang juga berbagai wisata pesisir yang telah termanfaatkan selama ini.

Gambar 5.

Penyampaian materi tentang ekonomi kreatif dan wisata pesisir oleh Bapak Tatang Supriatna, S.IP., M.I.Pol dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Kabupaten Subang



Lebih lanjut, beliau mengajak masyarakat Kabupaten Subang yang hadir dalam acara Abdimas untuk aktif melihat peluang sumber daya pesisir seperti pantai, tambak, hutan bakau, dan lainnya agar

dikembangkan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Direktorat Jasa Kelautan. Ajakan tersebut disambut baik oleh para peserta yang tampak bersemangat berdiskusi tentang perizinan usaha wisata bahari juga tambak pinggir pantai juga ketersediaan bantuan pemerintah untuk pengajuannya.

Sedangkan kesempatan terakhir dalam sosialisasi disampaikan oleh perwakilan perguruan tinggi yaitu Ibu Dr. Estu Widarwati, SE., M.Si, CRA, CFPP dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja. Materi pengembangan ekonomi masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Subang dipresentasikan sebagai pengetahuan mengenai pentingnya pengembangan masyarakat pesisir, juga tahapan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Aspek sosial, ekonomi, budaya dan konflik kepentingan juga aspirasi masyarakat penting diperhatikan sebagai pertimbangan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan tersebut. Model Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat - PPBM atau *Community Based Coastal Management (CBCM)* dikemukakan oleh beliau sebagai alternatif model pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Subang dan hal ini disambut baik oleh semua peserta yang hadir. Tampak kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merespon baik dengan pertanyaan dan konfirmasi mengenai kejelasan cakupan koordinasi antara pusat, daerah, dan lokal masyarakat pesisir untuk rencana pengembangan yang dilontarkan.

Sesi praktik sosialisasi diakhiri dengan beberapa diskusi dua arah dari para pemateri dan peserta yang dilanjutkan break isihoma.

2. Sesi praktik pemetaan sumber daya yaitu dengan pendekatan Forum Discussion Group (FGD)

Pemetaan sumber daya merupakan proses kegiatan yang menghasilkan gambaran suatu kondisi baik dalam bentuk peta, tabel, maupun kategorial informasi. Praktik pemetaan informasi sumber daya pesisir dalam kegiatan Abdimas ini diperlukan untuk kelengkapan data awal mengenai potensi dan kendala pengembangan sumber daya wilayah pesisir baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Gambar 6.

Proses Pelaksanaan Pemetaan Sumber Daya melalui FGD untuk mendapatkan data dan informasi potensi wilayah dan kendalanya baik material maupun non-material



Pendekatan *Forum Discussion Group (FGD)* untuk penjarangan data dan informasi menjadi rangkaian proses yang terhubung dengan sesi sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir agar terkumpulkan gambaran lengkap mengenai permasalahan dan kondisi terkini yang terjadi untuk bahan pertimbangan penyusunan rencana selanjutnya oleh pengambil keputusan realisasinya. Kelompok FGD yang terlibat antara lain:

a. Kelompok Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Subang

Informasi hasil *FGD* dari kelompok ini adalah bahwa sebenarnya para nelayan siap meningkatkan produksi tangkapan hasil laut namun terkendala keterbatasan bahan bakar kapal yang didapat dikarenakan adanya kebijakan pembatasan pembelian oleh PT. Pertamina. Pengajuan tambahan kuota bahan bakar dirasakan terlalu rumit bagi para nelayan seperti keharusan rekomendasi dinas, keaslian KTP, dan lainnya. Keterbatasan waktu para nelayan mengurus dokumen persyaratan dikarenakan waktu melaut yang tak pasti serta keterbatasan pendidikan juga asal wilayah para nelayan yang terkadang bukan asli penduduk pesisir Kabupaten Subang menyebabkan kesulitan untuk mengurus dokumen yang disyaratkan. Kelompok ini berharap ada solusi dari pemerintah sebagai terobosan kemudahan perolehan bahan bakar kapal untuk agar jangkauan melaut lebih luas sehingga produksi tangkapan lebih baik dan lebih banyak.

b. Kelompok Pengelola Wisata Pantai

Para pengelola wisata pantai pesisir menyampaikan hasil diskusi kelompoknya bahwa keberpihakan pemerintah pada masyarakat pesisir masih rendah dan kurang mensosialisasikan program-program bantuan bagi masyarakat pesisir atau nelayan. Hal tersebut menyebabkan munculnya rasa antipati pada kegiatan Abdimas yang melibatkan

pemerintah dan cenderung tidak percaya pada informasi yang disampaikan. Selain itu, kelompok ini menyatakan perlu kesesuaian alokasi anggaran dengan komponen bila pengembangan direalisasikan dan perlu melibatkan masyarakat pesisir dari perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.

c. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Ketua POKWASMAS yang hadir dalam kegiatan Abdimas ini antara lain dari Sungai Gangga, Hiu Laut, Bahari Jaya, Muara Kamal, Blanakan, Bintang Timur, Kuda Laut, dan Sumber Laut. Hasil *FGD* dari kelompok ini adalah bahwa adanya perselisihan batas wilayah yang perlu dicarikan solusi. Kasus yang terjadi antara pemanfaatan pinggir pantai untuk program penghijauan hutan bakau seringkali menghadapi konflik dengan para pemilik tambak dadakan yang dianggap menyerobot wilayah penghijauan. Selain itu, kelompok ini juga mengeluhkan permasalahan wisata pinggir pantai yang terbengkalai karena tidak ada dana untuk memperbaikinya padahal potensi sebelumnya cukup besar dan ramai pengunjung. Lebih lanjut, POKMASWAS menyampaikan pemanfaatan ruang laut perlu dikembangkan sesuai karakteristik pesisir yang tidak sama antar wilayahnya agar tidak terjadi kesia-siaan akibat salah bentuk pengembangannya.

d. Kelompok Pemerintah Daerah

Kelompok pembuat kebijakan ini juga dilibatkan dalam *FGD* untuk pemetaan potensi, tantangan, dan kendala pengembangan ekonomi pesisir dari usaha kelautan, perikanan, dan pariwisata. Kelompok Pemerintah Daerah ini diwakili dinas perikanan, dispora dan Camat Legonkulon yang hadir pada Kegiatan Abdimas. Hasil *FGD* yang dihimpun kelompok ini adalah bahwa usaha penangkapan berskala kecil karena kapasitas perahu hanya 3-5 GT juga minimnya informasi kondisi ekologi. Selain itu, prasarana pendukung usaha kelautan juga terbatas yaitu tidak ada tempat penampungan atau semaa gudang ikan bila melimpah, sehingga para nelayan cenderung menjual dengan harga rendah daripada busuk. Kebutuhan masyarakat pesisir Kabupaten Subang perlu dipetakan secara detail dan juga sinkronisasi sosialisasi program pemerintah pusat dan daerah.

Gambar 7.

Penyampaian hasil praktik pemetaan sumber daya melalui FGD



Praktik pemetaan sumber daya melalui *FGD* berlangsung pada jadwal 13.00 - 14.30 wib yang berupa diskusi terarah dengan adanya fokus yang jelas untuk didiskusikan dan dibahas bersama yaitu potensi, kendala/permasalahan, serta informasi sosial terkait masyarakat pesisir Kabupaten Subang. Pertanyaan dikembangkan sesuai topik dan fasilitator dalam hal ini dari Direktorat Kelautan mengarahkan diskusi dengan menggunakan panduan pertanyaan tersebut untuk menggali informasi lebih lanjut. Pemetaan sumber daya berupa data dan informasi termasuk permasalahan yang gali antara lain perihal potensi produksi garam, jasa wisata bahari, potensi mangrove, dan fasilitas pendukung kegiatan kelautan dan perikanan misal kebijakan pembatasan bahan bakar, kejelasan batas wilayah, juga kepastian penjualan produksi kelautan dan perikanan.

3. Sesi diskusi penyusunan kesimpulan

Kesimpulan adalah ikhtisar yang diperoleh setelah kesudahan pendapat. Sesi praktik sosialisasi yang dilanjutkan dengan praktik *FGD* dilanjutkan dengan diskusi poin-poin penting dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Subang. Diskusi dan penyusunan kesimpulan berlangsung dari jam 14.30-15.30 wib yang menekankan hasil antara lain potensi perikanan dan wisata bahari di Kabupaten Subang juga urgensi pengembangan ekonomi masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Subang.

Gambar 8.

Potensi dan Produksi Sumber Daya Perikanan Kabupaten Subang

Potensi	6.000 Unit / Jalur / Petak	<p>KAD</p>
Realisasi Pemanfaatan	4.157 Unit / Jalur / Petak	
Luas Lahan Pemeliharaan	68.569 M2	
Jumlah RTP	846 Orang	
Jumlah Produksi	11.397,22 ton	
Komoditas Unggulan	Mas, Nila, Patin	
Potensi	12.000 Ha	<p>KAT</p>
Realisasi Pemanfaatan Lahan	2.586 Ha	
Jumlah RTP KAT	2.595 Orang	
Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	9.708,74 Ton	
Realisasi Lahan Pembenihan	7.912 Ha	
Jumlah RTP Pembenihan	2.075 Orang	
Produksi Benih	4.538.609 Ribek	<p>TAMBAK</p>
Komoditas Pembesaran	Mas, Nila, Patin, Lele	
Potensi	10.000 Ha	
Realisasi Pemanfaatan	7.186,06 Ha	
Jumlah RTP	2.562 Orang	
Jumlah Produksi	39.346,74 ton	
Komoditas Unggulan	Udang, Bandeng, Nila, RL	

Gambar 9.

Potensi dan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Subang

No	Jenis / Produk	Produksi (Ton)	Lokasi
1	Penggaraman/Pengeringan (Asin)	20.044,60	Kecamatan Serangpanjang, Sagalaherang, Jalancagak, Cisalak, Tanjungsiang, Cijambe, Pagaden, Compreg, Pamanukan, Ciasem (10 Kecamatan) Jumlah Kelompok : 16
2	Pemindangan	17.222,10	
3	Fermentasi	7.654,30	
4	Pengolahan Lainnya	2.918,18	
Jumlah Kelompok		16	
Kebutuhan Bahan Baku		65,5 Ton	
Jenis Bahan Baku : Tongkol, Deles, Salem, Layang, Bandeng, Cakalang, Teri, deho, mas, bawal.			

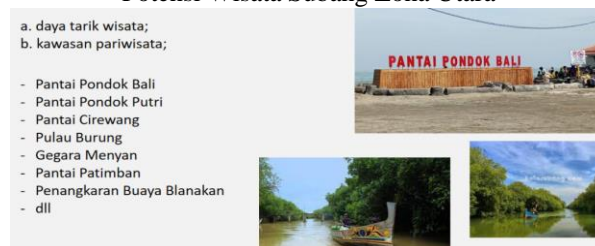
Ekplorasi potensi pesisir adalah penting dan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi wilayah yang ada khususnya produksi kelautan, tambak, dan wisata bahari. Koordinasi para pihak terkait atau stakeholder baik dari pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, juga pihak akademisi termasuk industri perlu diperkuat untuk perencanaan pengembangan terpadu. Hal ini selaras dengan PP No.93/PERMEN-KP/2020. bahwa potensi usaha kelautan dan perikanan dapat berupa usaha perikanan, usaha pergaraman, dan/atau usaha konservasi. Ketersediaan fasilitas dasar penting untuk mendukung pengembangan potensi tersebut antara lain minimal berupa akses jalan, parkir, dan instalasi air bersih.

Lebih lanjut, pemetaan sumber daya pesisir Kabupaten Subang menunjukkan adanya pariwisata pesisir potensial sebagai wisata bahari yang potensial seperti Pantai Pondok Bali, Pantai Pondok Putri, Pantai Cirewang, Pulau Burung, Gegara Menyan, Pantai Patimban, Penangkaran Buaya Blanakan dan beberapa potensi wisata pesisir lainnya yang masih sangat terbuka potensi besar untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Subang. Pengembangan wisata bahari ini sejalan dengan kebijakan dari

kementerian ekonomi kretaif dan juga program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tiga program prioritas yaitu pengembangan usaha garam rakyat, pemanfaatan biofarmakologi dan pengembangan wisata Bahari. Untuk mendorong pengembangan wisata bahari dari KKP telah memiliki program bantuan yang bisa di manfaatkan bagi pelaku wisata pesisir seperti pengadaaan alat *snorkling*, perahu/kapal wisata, mesin perahu/kapak, *landmark*, papan informasi/papan penunjuk arah, gapura/pintu gerbang, *tracking mangrove*, tambat labuh/dermaga/*jetty*, *gazebo*, pos jaga, loket tiket, kios pedagang, MCK, tong/bak sampah, gerobak sampah, menara pandang, ATV, pondok informasi wisata bahari, sarana olahraga/permainan air dan lapangan parkir. Melalui Permen KP No. 93/2020 Tentang Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari), KKP mendukung penuh pengembangan wisata bahari dengan mengoptimalkan peran masyarakat berbasis kawasan desa pesisir, termasuk pesisir Kabupaten Subang.

Gambar 10.

Potensi Wisata Subang Zona Utara



Upaya pengelolaan pesisir dengan seluruh komponennya menggunakan prinsip keterpaduan integrasi aspek fisik, ekologi, biologi, sosial, ekonomi, politik, budaya serta pertahanan dan keamanan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan pesisir agar tetap berkelanjutan. Kesuksesan pengelolaan pesisir adalah yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pengawasan dan implementasi.

Gambar 11.

Penutupan Kegiatan Abdimas



Kegiatan Abdimas diakhiri dengan sesi foto bersama dan kunjungan lapangan sekitar lokasi antara lain pelelangan ikan dan tempat pembuatan kapal.

D. Simpulan

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintahan Daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Salah satu program pengembangan potensi yang menjadi fokus Kabupaten Subang yaitu potensi wilayah pesisir Kabupaten Subang yaitu perikanan dan kelautan. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir adalah tangkapan hasil laut karena pekerjaan didominasi sebagai nelayan, sehingga dapat dikatakan bahwa basis perekonomian masyarakat pesisir adalah sektor perikanan. Namun ketidakpastian hasil tangkapan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan penghasilan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk di wilayah pesisir pantai memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah dikarenakan adanya kendala musim tangkap ikan yang bergantung pada cuaca, sehingga apabila tidak memungkinkan melaut maka masyarakat pesisir mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karenanya, upaya pengembangan mata pencaharian perlu dilakukan sebagai alternatif solusi kendala ekonomi masyarakat pesisir yaitu eksplorasi potensi wilayah pesisir agar membuka kesempatan kerja dan nilai tambah sumber daya pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara terpadu melalui pendekatan yang melibatkan *stakeholder* dengan masyarakat sebagai sumber daya potensial untuk turut serta dengan didukung berbagai sektor industri terkait. Masyarakat dengan heterogenitasnya dapat dikembangkan melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat masyarakat. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan dan kemandirian ekonomi dan turut serta dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipahami

bahwa posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung dari pihak luar seperti pemerintah melainkan masyarakat sebagai subjek (agen atau partisipasi yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Masyarakat mandiri sebagai ruang dan kapasitas mengembangkan potensi, kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, dan turut serta dalam membangun serta mengembangkan ekonomi wilayah. Pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dapat digagas melalui program pemberdayaan terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholder*.

Berdasarkan PP Nomor 93/PERMEN-KP/2020, *stakeholder* atau pemangku kepentingan utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat. Pengembangan ekonomi pesisir dalam berbentuk peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan dapat disinergikan dengan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pameran benda muatan kapal tenggelam, penelitian dan/atau pendidikan, konservasi, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau jasa kelautan dan perikanan lainnya, termasuk wisata bahari yaitu kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.

Pengelolaan perairan dan jasa kelautan wilayah pesisir perlu dipersiapkan bersama masyarakat pesisir dan para stakeholder dengan pendekatan kolaboratif (PK). Beberapa persiapan tersebut antara lain penguatan prinsip pemberdayaan dan keberlanjutan, komitmen *community based and collaborative* antisipasi konflik kepentingan, kesadaran masyarakat pentingnya peningkatan ekonomi wilayah pesisir. Lebih lanjut, pengembangan masyarakat pesisir didasarkan pada kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat dan potensi sumber daya yang dimiliki baik material maupun non-material.

Pengelolaan sumber daya manusia dalam hal ini pemberdayaan dilakukan melalui program *community based* dan proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan . pendekatan *bottom up*. Hal ini berarti pemberdayaan masyarakat menitik-beratkan keterlibatan Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang akan dilaksanakan. Adapun pendekatan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain, kedekatan masyarakat dengan sumber modal/ *collaborative program* bersama pihak pendanaan agar dapat menciptakan mekanisme pembiayaan diri sendiri, serta kedekatan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang berhasil dan berdaya guna, juga kedekatan masyarakat dengan pasar.

Pengembangan ekonomi masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Subang menjadi suatu kesempatan baik untuk direalisasikan dalam kerangka model pengelolaan kolaboratif antara stakeholder dan masyarakat lokal pesisir. Komitmen kuat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten untuk menjadikan pembangunan wilayah pesisir sebagai prioritas pembangunan tercermin dari adanya alokasi anggaran untuk bidang kelautan dan perikanan serta ketersediaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan juga Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga. Kesamaan pemahaman pemanfaatan peluang dan sumber daya pesisir melalui praktik sosialisasi dan pemetaan sumber daya dengan *FGD* sebagai wadah aspirasi masyarakat juga *stakeholder* adalah penting untuk kelanjutan tahapan berikutnya dalam perancangan program pengembangan ekonomi pesisir khususnya di Kabupaten Subang.

E. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Abdimas ini yaitu Direktorat Jasa Kelautan KKP, Dinas Perikanan Kabupaten Subang, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Kabupaten Subang, KUD Mandiri Fajar Sidik Blanakan, Masyarakat Wilayah Pesisir Kabupaten Subang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

F. Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat, R.M. (1993). Metode-metode penelitian masyarakat. Edisi 3. Gramedia, Jakarta
- Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- MacMillan, J.H. and Schumacher, S. (2001) Research in Education. A Conceptual Introduction. 5th Edition, Longman, Boston.
- Pomeroy, R.S., & MJ Williams. (1994). Fisheries Co-management and Small Scale Fisheries A Policy Brief. ICLARM. Filipines.
- Sanim, B., Budiharsono, S., Oktaviani, R., & Suaedi. (2021). Disain Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir Berkelanjutan Secara Partisipatif Di Kabupaten Subang
- Yonvitner., Adi, H.S., Yuliana, E. (2014). Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir, BMP MMP15104 Universitas Terbuka.